

## Bab 4

# Rekonstruksi Sosial menuju Sekolah Inklusi Berkeadilan di Era Society 5.0

Dwitya Sobat Ady Dharma

### A. Rekonstruksi Sosial dalam Pendidikan Inklusif

Pendidikan berkeadilan mencakup pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan, serta memberikan kesempatan yang sama bagi semua siswa tanpa terkecuali. Pendidikan berkeadilan merujuk pada upaya untuk menciptakan sistem pendidikan yang adil dan merata bagi semua individu, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau kebutuhan khusus. Hal ini melibatkan pemerataan akses terhadap pendidikan yang berkualitas, kesempatan belajar yang sama, serta pelayanan pendidikan yang adil bagi semua siswa. Beberapa ahli memberikan pandangan bahwa pendidikan berkeadilan sampai saat ini masih menjadi topik relevan untuk didiskusikan (Berkowitz, 2022; Weathers & Sosina, 2022; Ball & Collet-Sabé, 2022). Pendidikan berkeadilan memiliki dasar bahwa setiap individu mempunyai

---

D. S. A. Dharma

Universitas Negeri Yogyakarta, e-mail: paksobat@gmail.com

© 2023 Editor & Penulis

Dharma, D. S. A. (2023). Rekonstruksi Sosial menuju Sekolah Inklusi Berkeadilan di Era Society 5.0. Dalam A. C. Nur & F. N. Mahmudah (Ed.), Masa Depan Manajemen Pendidikan Indonesia: Era Society 5.0 (87–112). Penerbit BRIN. DOI: 10.55981/brin.1354.c1057 E-ISBN: 978-602-6303-57-8

hak yang setara dalam memperoleh pendidikan bermutu tanpa diskriminasi jenis kelamin, agama, ras, status sosial, dan disabilitas. Pendidikan berkeadilan menitikberatkan pada pemenuhan hak dan menjamin setiap individu mendapatkan pembelajaran yang relevan (Ainscow, 2020), tepat (Mayes, 2022), inklusif (Baglieri, 2017), dan setara (Slee & Tait, 2022). Pandangan ini menekankan pada urgensi untuk menyediakan aksesibilitas pembelajaran bagi semua peserta didik.

Pendidikan berkeadilan dalam konteks penyandang disabilitas di Indonesia diterjemahkan beragam, salah satunya melalui implementasi pendidikan inklusi. Pendidikan berkeadilan dan pendidikan inklusif saling terkait dalam upaya menciptakan sistem pendidikan yang adil, merata, dan inklusif bagi semua individu. Pendidikan berkeadilan menekankan pemerataan akses terhadap pendidikan yang berkualitas dan kesempatan belajar yang sama bagi semua siswa, tanpa terkecuali. Di sisi lain, pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang terbuka bagi siapa saja dengan latar belakang serta kondisi yang berbeda, dan mencakup prinsip-prinsip seperti keberagaman, kebermaknaan, keberlanjutan, dan keterlibatan.

Pendidikan berkeadilan bagi siswa disabilitas merupakan langkah penting dalam mewujudkan lingkungan sekolah yang adil bagi seluruh siswa. Pendidikan berkeadilan akan memperluas kesempatan bagi siswa disabilitas agar dapat berbaur dengan teman sebaya dan mendapatkan dukungan penuh pada pembelajaran yang dapat diakses dengan akomodasi kurikulum yang dilakukan oleh guru. Oleh sebab itu, kompetensi guru menjadi salah satu kunci dalam mendukung pendidikan berkeadilan.

Studi ini dilakukan dengan menggali data dari berbagai sumber data sekunder yang merupakan sumber data utama. Data utama ini kajian dengan metode *desk research* atau *secondary data analysis* (SDA) dengan data kualitatif. Data dan literatur yang terkumpul kemudian disaring dan disintesis untuk merumuskan inti dari gagasan yang dibahas. Tujuan dari penulisan artikel ini ialah (1) menjelaskan hubungan antara keragaman dan rekonstruksi sosial di sekolah inklusi;

(2) menjelaskan bagaimana cara melakukan akomodasi kurikulum yang ramah pada siswa disabilitas; dan (3) menjelaskan peran guru dalam dinamika pendidikan berkeadilan di era 5.0.

## **B. Keragaman dan Rekonstruksi Sosial di Sekolah Inklusi**

Rekonstruksi sosial di sekolah inklusi adalah upaya untuk menyatukan keberagaman dan ketimpangan sosial yang ada dalam masyarakat. Dalam konteks ini, keragaman budaya menjadi dasar dalam menentukan filsafat, model, dan hubungan sekolah dengan lingkungan sosial-budaya. Guru dapat memainkan peran budaya sebagai alat untuk mempersatukan pemahaman inklusif dalam dunia pendidikan yang terjadi ketika muncul perbedaan dalam kelompok budaya, bahasa, agama, status sosial, gender, dan kemampuan. Peran guru dalam menghadapi siswa disabilitas di sekolah inklusi sangatlah krusial dalam konteks keragaman dan rekonstruksi sosial. Guru tidak hanya menjadi penghubung antara siswa dengan kurikulum, tetapi juga menjadi fasilitator yang mendesain kerja sama, saling menghargai, serta penghargaan terhadap keberagaman di ruang kelas. Guru tidak hanya mengajar, tetapi juga mengubah persepsi dan sikap siswa terhadap perbedaan, membantu menciptakan lingkungan yang mendukung, dan inklusif. Dengan memahami siswa dalam mengatasi hambatan-hambatan yang mereka hadapi, guru tidak hanya membangun fondasi pengetahuan, tetapi juga memainkan peran kunci dalam membentuk masyarakat yang lebih inklusif dan menghadirkan rekonstruksi sosial yang positif di lingkungan sekolah.

Pemahaman pada keberagaman sebagai sesuatu yang lumrah menjadi penting karena akan membuka akses yang selama ini tertutup dalam bidang pendidikan. Hal yang masih salah dipahami ialah pendidikan khusus selalu dipersepsikan sebagai sebuah tempat untuk mendidik siswa disabilitas atau lebih dikenal dengan istilah sekolah luar biasa (SLB). Adapun pendidikan khusus ialah sebuah layanan berbasis individu sehingga setiap siswa disabilitas bisa mendapatkan layanan di mana saja dalam jalur pendidikan formal, informal,

ataupun nonformal. Pendidikan khusus juga dapat didapatkan di perguruan tinggi. Dalam konteks ini, pendidikan khusus diartikan sebagai layanan pendidikan bagi siswa disabilitas di perguruan tinggi dengan tujuan memperluas akses pendidikan bagi siswa disabilitas, meningkatkan mutu layanan pendidikan bagi siswa disabilitas, dan menghargai keberagaman serta kesetaraan.

Seiring dengan perkembangan zaman, diperlukan rekonsepsi disabilitas karena dalam beberapa kasus terjadi peningkatan jumlah disabilitas yang berujung pada label. Berdasarkan kajian Dwyer (2022), Scior et al. (2020), Silván-Ferrero et al. (2020), Suharto et al. (2016), istilah disabilitas apabila digunakan, akan menimbulkan persepsi ketidakmampuan dan menggiring opini pada stigma tertentu. Dalam konteks pendidikan, interaksi antarsemua warga sekolah bisa dilakukan oleh semua tanpa terjebak label (García-Carrión et al., 2019). Hal ini dapat diartikan konsep kemampuan dan ketidakmampuan merupakan sebuah rangkaian makna yang tidak berdiri sendiri (Campbell, 2019). Memahami disabilitas sebagai sebuah keragaman dan sesuatu yang wajar tidak hanya memerlukan konseptualisasi disabilitas sebagai sebuah fenomena alami, tetapi juga berarti mengembangkan rasa kemanusiaan bagi setiap individu. Munculnya kesadaran kritis ini akan mendorong pendekatan HAM dalam penyelenggaraan pendidikan yang lebih inklusif.

Dewey (2021) meyakini bahwa pendidikan merupakan bagian dari proses rekonstruksi sosial. Sekolah dapat berperan dalam membawa demokrasi dan kontrol sosial yang lebih luas. Dewey menekankan bahwa manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang berada dalam lembaga sosial, yaitu sekolah. Dewey (2021) berpendapat bahwa sekolah harus mewakili kehidupan nyata, bukan malah menjadi lembaga yang kaku dan menghilangkan keterkaitan antara sosial dan pendidikan. Menurut Counts (1959) dan McKernan (2013), pendidikan adalah sarana untuk mempersiapkan masyarakat untuk tatanan sosial baru dengan pisau analisis pedagogi kritis. Pandangan Counts (1946) tentang pendidikan serupa dengan pandangan Dewey yang berpendapat bahwa siswa harus berlatih kerja sama dengan cara yang demokratis.

Model rekonstruksi sosial sangat akomodatif terhadap nilai-nilai budaya dan fenomena sosial lain yang ada di masyarakat (Martin, 1994; Hermaswari & Lasmawan, 2021). Rekonstruksi sosial melihat kurikulum sebagai sarana untuk perubahan sosial. Pendidikan dapat membantu memberikan jalan untuk perubahan dan membantu siswa memahami realitas sosial budaya, mendorong untuk membuat perbedaan, dan membentuk aktivitas dalam dunia nyata (Uwak, 2018; Dewey, 2012). Pendidikan berperan sebagai instrumen rekonstruksi sosial sehingga diharapkan mampu menstabilkan tatanan sosial dan melestarikan budaya di masyarakat (Mutisya et al., 2021). Orientasi rekonstruksi sosial memandang kurikulum sebagai penggerak perubahan dalam masyarakat. Dengan demikian, pendidikan yang ditawarkan di sekolah harus mampu menstabilkan tatanan sosial, tetapi harus tetap bersikap netral (Stanley, 1981; Shrivastava, 2017).

Rekonstruksi sosial adalah filosofi yang menekankan rekonstruksi pengalaman pribadi dan sosial seseorang untuk membayangkan kemungkinan masa depan. Berlawanan dengan pandangan pendidikan sebagai wahana pelestarian dan transmisi nilai-nilai budaya tradisional, para rekonstruksionis sosial mengambil pendidikan sebagai wahana perubahan sosial (McKernan, 2013; Chung & Li, 2020). Secara filosofis, ideologi ini memiliki gagasan bahwa sekolah merupakan instrumen perubahan sosial dengan bimbingan guru (Heywood, 2018; Diyanti & Zuhdi, 2020; Benson et al., 2017). Dewey merekomendasikan agar guru menggunakan tuntutan, tantangan situasi sosial, dan pendidikan karakter di mana siswa menemukan diri mereka untuk merangsang kekuatan siswa untuk melakukan perubahan sosial (Reed & Johnson, 2000; Suhartini & Sekarningrum, 2023).

Berkaitan dengan stigma disabilitas, sekolah merupakan salah satu tempat di mana ketidaksetaraan diciptakan, dipertahankan, serta direplikasi dan sekaligus merupakan tempat di mana perlawanan pada ketidakadilan dapat dilakukan. Lembaga pendidikan dipandang sebagai sarana utama di mana siswa siap untuk merekonstruksi sistem untuk melawan ketidaksetaraan dan penindasan serta marginalisasi pada orang lain (McKernan, 2013). Sekolah harus berperan sebagai agen perubahan serta mewujudkan komunitas yang lebih setara

dan berkeadilan. Nilai-nilai yang dapat dibangun ialah kepekaan dan penghargaan pada siswa disabilitas yang memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang berkeadilan.

Lembaga pendidikan dalam konteks rekonstruksi sosial dapat digunakan sebagai agen perubahan ke arah yang positif. Dalam kaitannya dengan stigma disabilitas, sekolah dapat berperan sebagai pendukung kesetaraan, menciptakan keadilan, membebaskan diskriminasi, dan membuka kesempatan yang lebar pada akses pendidikan. Dalam hal ini, sekolah harus menciptakan kurikulum yang humanis dan terbuka sebagai sarana mengembangkan pembelajaran yang antidiskriminasi yang mampu diakses oleh semua anak. Pendidik memiliki peran sebagai garda terdepan yang harus memiliki pemahaman dasar bahwa permasalahan sosial yang dihadapi siswa disabilitas, seperti diskriminasi dan ketidakadilan, dapat dihilangkan dengan aktivitas positif yang dilakukan di sekolah secara berkesinambungan. Sekolah sebagai agen sosial berperan sebagai tempat pembuatan perubahan yang diharapkan mampu mencetak siswa yang tidak lagi melihat kedisabilitas sebagai sebuah keanehan, tetapi sebagai sebuah bentuk keragaman sosial.

Kurikulum yang didesain oleh sekolah dapat diciptakan secara fleksibel yang disesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Kegiatan yang dilakukan sebisa mungkin memiliki makna yang dibingkai dengan aktivitas yang menyenangkan sehingga nilai-nilai positif yang hendak ditanamkan ke dalam diri siswa dapat terinternalisasi dengan maksimal. Kegiatan positif yang dapat dilakukan, misalnya melakukan pelayanan sosial berbasis pemberdayaan di panti asuhan, menjalin *sister school* dengan sekolah khusus (SLB), melakukan *live in* di pedesaan, memperingati hari-hari besar nasional dan internasional, maupun melakukan pembelajaran dengan strategi *problem-based learning* dan *project-based learning*. Berbagai macam kegiatan ini akan menumbuhkan dan mengembangkan rasa saling menghargai antarsiswa, penerimaan pada perbedaan, adaptasi, dan toleransi. Bagi siswa disabilitas, kegiatan ini akan meningkatkan kepercayaan diri, *self-esteem*, berlatih komunikasi, berinteraksi, dan membentuk rasa berharga pada diri sendiri.

Peran guru dalam memfasilitasi keberagaman tidak hanya terbatas pada penyampaian materi pelajaran, tetapi juga mencakup upaya dalam melakukan rekonstruksi sosial di lingkungan pendidikan. Guru memegang peran kunci dalam menciptakan lingkungan yang inklusif, di mana perbedaan dihargai dan diintegrasikan sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Mereka bertanggung jawab untuk memfasilitasi dialog, pemahaman, serta penghargaan terhadap keragaman budaya, sosial, dan individu di dalam kelas. Dengan menciptakan ruang yang aman dan mendukung, guru membantu siswa untuk memahami perspektif-perspektif yang berbeda, menghormati pluralitas, dan membangun keterampilan kolaborasi yang diperlukan dalam masyarakat yang makin beragam. Melalui peran ini, guru tidak hanya menjadi pengajar, tetapi juga agen perubahan sosial yang membantu mengarahkan proses rekonstruksi sosial yang inklusif di sekolah.

Penting untuk dipahami bahwa disabilitas merupakan salah satu aspek keragaman manusia yang perlu diakui dan dihormati eksistensinya dalam lingkungan sekolah. Dalam konteks pendidikan, guru sebisa mungkin harus melepaskan stigma negatif saat merancang konten pembelajaran, aktivitas pembelajaran, dan proses evaluasi. Stigma siswa disabilitas yang pada awalnya dipengaruhi oleh kekurangan fisik dan mental, dalam konteks rekonstruksi sosial tidak lagi dipandang dari segi kelemahan semata. Rekonstruksi yang dilakukan oleh sekolah melalui berbagai aktivitas intrakurikuler dan ekstrakurikuler akan mengeliminasi pandangan negatif yang harapannya dapat membuka akses dan partisipasi dalam pembelajaran akan lebih lebar.

### **C. Akomodasi dan Kurikulum Ramah Disabilitas**

Guru memiliki peran penting dalam menciptakan kurikulum yang ramah terhadap siswa disabilitas di sekolah inklusi. Guru bertanggung jawab untuk mengidentifikasi kebutuhan individual setiap siswa dengan disabilitas, mengadaptasi metode pengajaran, dan menyediakan lingkungan belajar yang sesuai. Guru berkewajiban mengintegrasikan strategi pembelajaran yang inklusif, mengubah

materi pembelajaran agar dapat diakses oleh semua siswa, serta mengadopsi pendekatan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan setiap individu. Dengan menciptakan kurikulum yang fleksibel dan ramah pada siswa disabilitas, guru memainkan peran penting dalam menjamin bahwa siswa disabilitas, dapat mengakses pendidikan secara efektif dan meraih potensi mereka secara penuh di sekolah inklusi.

Bersesuaian dengan Kurikulum Merdeka, kurikulum dirancang dengan mengedepankan materi esensial yang memiliki kebermanfaatan bagi siswa. Perspektif pengembangan kurikulum mengarah pada perkembangan karakter positif dan kompetensi peserta didik. Praktik di lapangan, guru memiliki keleluasaan dan keluwesan dalam merancang kegiatan sehingga keluaran yang diharapkan dapat terwujud dengan maksimal. Guru pun dapat menggunakan teknologi digital sebagai media dan alat pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi siswa, sekaligus sebagai alat bantu memperluas akses pembelajaran bagi semua anak. Penerapan Kurikulum Merdeka sejatinya memudahkan guru dalam memfasilitasi siswa disabilitas karena guru dapat melakukan pembelajaran terdiferensiasi, menggunakan teknologi asistif, dan melakukan pembelajaran dengan lebih mendalam karena materi yang dipilih merupakan materi esensial.

Setiap siswa disabilitas di sekolah inklusi berhak mendapatkan akomodasi yang layak. Akomodasi yang layak terdiri atas dukungan anggaran, penyediaan sarana dan prasarana, penyiapan pendidik, dan penyediaan kurikulum. Berkaitan dengan penyediaan kurikulum, kurikulum bagi siswa disabilitas dilakukan secara berkelanjutan dengan cara menyesuaikan tujuan, isi, materi, proses, waktu, sumber belajar, dan evaluasi untuk memenuhi kebutuhan siswa disabilitas. Hal ini memungkinkan siswa disabilitas mengakses pendidikan yang setara dengan peserta didik lain. Akomodasi dilakukan untuk mencegah diskriminasi, stigma negatif, dan prasangka dari pendidik atau teman sebaya terhadap siswa disabilitas. Tujuannya adalah untuk memastikan kesempatan yang seimbang, memastikan tujuan dapat diraih, dan meningkatkan keterlibatan (Lee & Wehmeyer, 2010; Horn & Banerjee, 2009; Kern et al., 2001), bukan untuk menurunkan

standar pembelajaran dengan memberikan nilai yang bukan berasal dari hasil kinerja anak.

Kurikulum siswa disabilitas di sekolah inklusi dapat dirancang dengan mencermati kurikulum nasional yang kemudian dimodifikasi bersesuaian dengan kondisi dan karakter siswa. Akomodasi ini dilakukan untuk menciptakan partisipasi siswa disabilitas dalam pembelajaran. Partisipasi ini dapat dimaknai dengan terbukanya akses yang lebih besar pada kegiatan belajar, baik kegiatan kurikuler maupun ekstrakurikuler, sehingga siswa disabilitas mampu melakukan interaksi sosial yang lebih baik, meningkatkan prestasi belajar, dan mampu menguasai kompetensi yang diharapkan. Akomodasi kurikulum dapat dilakukan dengan cara tidak mengubah standar atau tujuan pembelajaran. Akomodasi yang dapat dilakukan guru, misalnya dengan penggunaan *subtitle* dalam video bagi siswa disabilitas rungu, penggunaan pembaca layar bagi siswa disabilitas netra, penambahan waktu pengerjaan tugas/ujian, maupun penggunaan bantuan juru bahasa isyarat (JBI) apabila dibutuhkan.

Akomodasi dapat dilakukan melalui modifikasi dan adaptasi kurikulum. Modifikasi kurikulum dilakukan oleh pendidik untuk menjamin siswa dapat mengakses pembelajaran, misalnya dengan mengubah bahan belajar, media pembelajaran, evaluasi, strategi, maupun metode (Sandall et al., 2019). Modifikasi yang dilakukan dapat memengaruhi bahan yang digunakan atau cara penyampaian pelajaran, tetapi tidak mengubah tujuan dan standar pembelajaran dari aktivitas yang dilakukan. Sementara itu, adaptasi kurikulum dapat diartikan sebagai aktivitas menaik-turunkan target pembelajaran sesuai dengan kondisi anak. Istilah modifikasi dan adaptasi dilakukan secara berkelanjutan dan simultan untuk memastikan anak memiliki keterlibatan dalam pembelajaran yang merupakan elemen esensial dalam sekolah inklusi (Majoko, 2019).

Menurut Sandall et al. (2019), terdapat beberapa modifikasi yang dapat dilakukan oleh guru, antara lain, (1) modifikasi lingkungan dengan cara mengubah lingkungan fisik dan sosial agar mampu diakses oleh disabilitas; (2) modifikasi peralatan belajar agar disabilitas

mampu menggunakan dengan kesulitan yang minim; (3) modifikasi kegiatan dengan cara menyederhanakan tugas yang rumit dengan memecahkannya menjadi bagian-bagian yang lebih kecil atau mengurangi jumlah langkah-langkah yang harus dilakukan; (4) modifikasi preferensi dengan cara mengintegrasikan minat anak ke dalam rutinitas; dan (5) modifikasi sarana dengan cara menggunakan perangkat khusus/perangkat adaptif. Modifikasi kurikulum ini dilakukan menyesuaikan dengan ragam disabilitas yang dialami anak.

Dalam konteks Indonesia, akomodasi kurikulum dapat dilakukan melalui empat model, yaitu duplikasi, modifikasi, substitusi, dan omisi. Sebelum menentukan model yang digunakan, pendidik perlu melakukan asesmen guna mengetahui kondisi autentik anak. Tabel 4.1 menunjukkan banyak alternatif yang dapat dilakukan guru dalam melakukan penyesuaian pembelajaran pada siswa disabilitas. Penyesuaian ini dilakukan oleh pendidik pada setiap mata pelajaran untuk memastikan setiap komponen pembelajaran dapat dijangkau oleh siswa dengan cara mengombinasikan aspek-aspek pembelajaran dengan empat model belajar (duplikasi, modifikasi, substitusi, dan omisi). Duplikasi dilakukan dengan cara menyamakan pembelajaran siswa disabilitas dengan siswa reguler atau mengambil seluruh kurikulum siswa reguler untuk siswa disabilitas. Pada praktiknya, guru dapat melakukan duplikasi pada siswa disabilitas tanpa adanya hambatan kognitif. Namun, sebelum dilakukan pembagian ini, asesmen terhadap kondisi awal siswa perlu dilakukan agar tepat sasaran.

Modifikasi pembelajaran dilakukan dengan cara menyesuaikan aspek pembelajaran dengan kondisi siswa untuk memastikan siswa mendapatkan akses. Sementara itu, substitusi kurikulum dilakukan dengan mengganti bagian pembelajaran yang setara dengan bagian lain. Modifikasi dan substitusi kurikulum sering dilakukan secara bersamaan sesuai dengan kondisi siswa. Beberapa hal yang perlu diperhatikan saat melakukan substitusi adalah pengganti harus setara, tetap berpedoman pada materi yang diajarkan, tidak menghilangkan tantangan bagi siswa, dan tidak bersifat diskriminatif. Lain halnya

dengan substitusi, omisi kurikulum bersifat menghilangkan materi atau mata pelajaran tertentu karena tidak memungkinkan untuk dilaksanakan pada siswa. Omisi dilakukan ketika siswa disabilitas benar-benar tidak mampu melakukan suatu kegiatan dengan beberapa sebab, seperti ketidakmampuan kognitif atau keterbatasan fisik berat. Saat melakukan omisi, guru harus berhati-hati agar tidak merenggut hak siswa untuk belajar.

Empat model akomodasi ini dapat digunakan secara fleksibel sesuai dengan kebutuhan siswa dan sangat bervariasi bergantung dari kondisi anak, topik suatu mata pelajaran, dan kekreativitasan guru. Sebagai contoh, siswa dengan kursi roda akan mendapatkan banyak penyesuaian pada mata pelajaran olah raga, tetapi tidak pada mata pelajaran eksakta. Ketika siswa bekursi roda mendapati topik bola basket, akan terjadi beberapa kemungkinan: (1) guru akan menghilangkan (omisi) topik tersebut; (2) guru akan menggantinya (substitusi) dengan topik lain; atau (3) guru akan memodifikasi praktik basket agar siswa kursi roda dapat mengakses permainan. Saat akan melakukan evaluasi, guru juga akan dihadapkan pada kemungkinan menyamakan atau memperpanjang waktu. Proses penyesuaian ini akan dilakukan terus-menerus pada berbagai komponen pembelajaran.

Kegiatan akomodasi kurikulum erat kaitannya dengan kompetensi guru yang kreatif, pembelajar sepanjang hayat, sabar, detail, dan tidak gampang menyerah. Selain wajib memiliki empat kompetensi guru, guru harus memiliki kompetensi dasar mendidik siswa dengan beragam kondisi. Guru yang sudah piawai dalam melakukan akomodasi pembelajaran, akan mampu menciptakan pembelajaran yang ramah bagi semua. Siswa disabilitas akan mendapatkan haknya sebagai pemelajar yang setara, begitu pula siswa reguler juga akan tetap mendapatkan pembelajaran yang berkualitas. Kegiatan akomodasi dilaksanakan oleh guru berdasarkan pada hasil asesmen fungsional dan ragam disabilitas yang dialami anak. Asesmen fungsional dilaksanakan oleh satuan pendidikan (sekolah) yang berguna untuk mendapatkan informasi detail siswa terkait dengan kondisi, gangguan/hambatan, dan kebutuhan siswa disabilitas. Apabila guru sudah terbiasa dengan kegiatan asesmen, guru juga akan makin

piawai melakukan akomodasi pembelajaran karena merupakan satu kesatuan yang terkait.

Akomodasi pembelajaran ini apabila dilakukan secara konsisten, tidak akan menurunkan kesempatan untuk belajar sehingga siswa disabilitas dapat berprestasi di sekolah. Peran serta warga sekolah, utamanya guru, memberikan pengaruh besar pada munculnya kesadaran untuk menghargai dan memberikan hak yang sama. Kesadaran ini akan membangun atmosfer positif sekaligus menghilangkan diskriminasi sehingga menciptakan lingkungan yang ramah bagi semua. Akomodasi kurikulum ini sejalan dengan praktik pendidikan berkeadilan di mana sekarang tidak lagi disingkirkan dalam dunia pendidikan, tetapi sebagai pemelajar yang mampu berpartisipasi aktif dengan cara yang beragam.

Sebagai upaya memberikan kesempatan belajar yang adil bagi semua siswa, guru perlu melakukan akomodasi pembelajaran yang berdasarkan dari bukti dan data dari hasil asesmen. Dengan berbasis data, guru dapat melakukan akomodasi secara bijak, tepat, dan sesuai dengan kebutuhan serta kondisi siswa. Perlu disadari bahwa akomodasi kurikulum dalam rangka menciptakan pembelajaran yang ramah anak memerlukan sosok guru pembaharu yang aktif melayani siswa sebagai bentuk tanggung jawab moral. Selain melakukan tugas dan fungsinya dalam menyampaikan pembelajaran, guru berperan dalam membangun kesadaran tentang pentingnya menghormati keberagaman dan memberikan hak yang sama kepada semua siswa. Dengan demikian, praktik pendidikan berkeadilan dapat terwujud, dan semua siswa dapat berpartisipasi aktif dalam pembelajaran dengan cara yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

#### **D. Peran Guru dalam Dinamika Pendidikan Berkeadilan pada Era 5.0**

Peran guru sangat penting dalam mewujudkan pendidikan berkeadilan di era 5.0, terutama dalam konteks pendidikan inklusi. Guru bertugas sebagai agen perubahan yang mengarahkan transformasi pendidikan menuju lingkungan yang inklusif dan merata bagi setiap individu.

Dengan membawa nilai-nilai keadilan ke dalam setiap aspek pengajaran dan interaksi di kelas, guru membantu menciptakan dasar yang kuat bagi masyarakat belajar yang menghargai perbedaan, memperkuat rasa saling menghargai, dan menyediakan ruang bagi perkembangan potensi setiap siswa dengan bantuan teknologi.

Era Society 5.0 dimaknai sebagai sebagai konsep masyarakat yang berpusat pada manusia dengan didasari pada teknologi. Society 5.0 tidak hanya berkaitan dengan alat, metode, sistem, dan gagasan, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana faktor tersebut mampu memengaruhi manusia (Tavares & Azevedo, 2022; Falaq, 2020). Berdasarkan Salgues (2018), Society 5.0 memiliki karakteristik sebagai berikut: (1) menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang lengkap; (2) berpusat pada masyarakat; (3) partisipasi masyarakat; (4) memiliki nilai-nilai bersama: keberlanjutan, inklusif, efektif, dan kekuatan kecerdasan; dan (5) pengembangan disrupsi ekonomi. Society 5.0 digambarkan sebagai *smart community* dengan mengintegrasikan dunia fisik dan *cyberspace* dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam konteks pendidikan, dengan lahirnya era Society 5.0, diharapkan teknologi tidak mengubah peran guru dalam mendidik dan memberi contoh dalam upayanya membentuk karakter positif siswa. Pengetahuan dalam era ini memiliki personalisasi, interaksi, dan kontrol pribadi sehingga bersifat fleksibel dan humanis. Teknologi juga memberikan ruang belajar yang lebih kaya bagi siapa saja untuk belajar apa yang dipilih dan disenangi (Collins & Halverson, 2018). Guru pada era Society 5.0 tidak hanya perlu membekali siswa dengan kemampuan literasi dasar, tetapi juga kompetensi abad ke-21 yang meliputi berkomunikasi, kreatif berpikir kritis, dan kolaborasi. Inovasi berkelanjutan dari guru harus terus dilakukan karena guru tetap menjadi fokus utama (*human-centered*), tetapi didukung oleh teknologi untuk mempermudah proses belajar.

Peluang mengembangkan pembelajaran yang dapat diakses oleh siswa disabilitas di era 5.0 menjadi makin besar. Di sisi lain, tantangan yang dihadapi juga makin bertambah. Tantangan ini makin nyata terasa karena menuntut para guru menyesuaikan karakter zaman

yang berubah pesat. Karakter ini pun harus diimbangi dengan penguasaan literasi baru yang mumpuni, inovasi berkelanjutan, dan berpikir tingkat tinggi dalam menemukan solusi. Revolusi Industri 4.0 dan Society 4.0 belum sepenuhnya diimplementasikan di Indonesia sehingga perkembangan era 5.0 memiliki banyak penyesuaian dalam berbagai bidang. Penyesuaian ini wajar terjadi, tetapi akan menjadi hambatan besar bagi guru, terutama bagi yang tidak memiliki jiwa kreatif sehingga kurang mampu mengintegrasikan teknologi dengan aktivitas pembelajaran.

Pendidikan yang dapat diakses oleh siswa disabilitas menjadi salah satu fokus utama dalam era 5.0 yang menekankan integrasi antara ruang fisik dan maya. Dengan pemanfaatan teknologi asistif, guru dapat menurunkan kesenjangan penyandang disabilitas dalam mengakses pembelajaran. Pada era ini, guru tidak hanya melakukan pengajaran yang terbatas di ruang kelas, tetapi juga melalui sistem yang dapat mengintegrasikan kedua hal tersebut. Pemaduan ini akan memungkinkan siswa disabilitas memiliki akses yang lebih besar untuk mengikuti pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan. Dampak lainnya, pemaduan teknologi akan membuka ruang bagi siswa disabilitas dalam meningkatkan keterampilan sehingga akan memperluas jejaring yang lebih terbuka dan inklusif.

Pemanfaatan teknologi yang masif akan membuka ruang yang lebih besar dalam terbentuknya relasi dan jejaring. Dengan tergabung dalam komunitas belajar, guru dapat berkomunikasi, bertanya, dan mendapat ajang membagikan pengalaman belajar (*best practice*) pada sesama praktisi, bahkan dengan akademisi. Lebih jauh lagi, jejaring akan memberikan inspirasi penanganan siswa disabilitas dengan tetap memberikan pengajaran yang berkualitas untuk semua. Selain itu, komunitas belajar dapat menjadi ajang sosialisasi pandangan kolektif pada kondisi siswa disabilitas yang tidak lagi dilihat dari aspek kelemahan, ketidakberdayaan, dan belas kasihan, tetapi lebih kepada siswa yang sama dengan yang lainnya. Oleh sebab itu, guru pada era 5.0 diharapkan memiliki penguasaan teknologi yang mumpuni

sehingga mampu mengakses berbagai macam platform yang memiliki kebermanfaatan dalam pengajaran.

Perkembangan teknologi pada era 5.0 membawa peluang yang besar dalam mewujudkan pembelajaran yang berkualitas. Di tengah gempuran teknologi, menguasai kemampuan literasi digital menjadi penting, baik untuk guru dan siswa. Konsekuensinya, guru bukan satu-satunya sumber belajar karena materi bisa didapatkan secara luas dari aktivitas internet. Guru berperan sebagai penuntun dan pamong dalam pembelajaran sehingga siswa disabilitas mampu menggunakan teknologi dengan penuh etika, memiliki pemikiran kritis, serta memiliki kemampuan memilah, memilih, dan mengolah data/informasi dengan benar. Guru juga harus memastikan teknologi tidak menjadikan pembelajaran memiliki sekat sehingga lebih terkesan individualistis. Guru harus merancang suasana pembelajaran yang mengaktifkan rasa saling membutuhkan dan kolaboratif.

Pada era 5.0, desain universal (*universal design for learning*) dalam pembelajaran dapat diterapkan agar siswa disabilitas dapat terlibat secara nyata. Desain universal ini merupakan konsekuensi dari perubahan pemahaman disabilitas dari pendekatan medis menjadi pendekatan hak asasi manusia (Meyer et al., 2013) dan dapat diaplikasikan dalam berbagai aspek pembelajaran. Pembelajaran yang dirancang sebisa mungkin dapat diakses dan digunakan oleh sebanyak mungkin siswa (Fovet, 2019) secara wajar tanpa perlu untuk adaptasi yang berlebihan. Kerangka desain universal sangat menghargai keberagaman pemelajar yang dirancang dan diimplementasikan dalam kurikulum agar aksesibel, mendukung, dan melibatkan dari awal pembelajaran. Desain universal melibatkan berbagai pendekatan, misalnya mempresentasikan materi dengan beragam cara sehingga siswa disabilitas dapat mengakses setiap materi yang ditampilkan.

Desain universal dalam pembelajaran memiliki tiga prinsip, yaitu (1) representasi (*representation*) yang memberikan beragam cara untuk mengakses informasi dan pengetahuan, misalnya dengan berbagai alat, bahasa, ekspresi, simbol, dan merupakan salah satu pedoman yang menyediakan pilihan untuk penguasaan konsep; (2)

prinsip ekspresi (*expression*) yang mengakomodasi berbagai alternatif kepada pemelajar untuk mendemonstrasikan apa yang ia ketahui; dan (3) prinsip keterlibatan (*engagement*) yang mengacu pada beberapa cara merekrut, mempertahankan usaha, ketekunan, dan self-regulation siswa (Meyer et al., 2013). Prinsip utama dalam desain universal akan membuat guru merancang pembelajaran dengan tujuan, metode, materi, dan evaluasi yang bervariasi.

Penerapan dari pembelajaran universal ialah penggunaan media yang beragam (Khadka, 2019; Friedman & George, 2022). Media yang digunakan dalam pembelajaran harus beragam untuk mendukung siswa disabilitas yang memiliki hambatan dalam mengakses informasi di salah satu media. Melengkapi kelas dengan beragam media yang memperkaya lingkungan belajar, memungkinkan pemelajar untuk memperkaya materi dari cara pandang yang berbeda. Metode representasi yang fleksibel dapat dilakukan dengan format digital yang diintegrasikan dengan aktivitas pembelajaran. Hal ini berkaitan dengan kondisi siswa disabilitas yang dapat memahami informasi lebih baik melalui sarana visual atau pendengaran daripada teks cetak. Untuk mengakomodasi perbedaan ini, guru harus melengkapi media dengan teks, ucapan, video dan audio sehingga siswa disabilitas dapat berinteraksi dengan konten dengan menggunakan banyak indra, sesuai dengan preferensi belajar masing-masing.

Guru harus memiliki mampu merancang kelas dengan beragam presentasi dan aktivitas yang memberikan banyak cara bagi siswa untuk mendemonstrasikan apa yang mereka pelajari. Alternatif ini sangat berguna bagi siswa yang memiliki hambatan dalam bermobilitas. Keuntungan menggunakan aktivitas yang beragam saat pembelajaran bagi siswa adalah membangun kemahiran kemampuan komunikasi yang dibutuhkan di abad ke-21 dan melengkapi berbagai alternatif bagi siswa yang memiliki kesulitan dalam bermobilitas. Kegiatan didesain dengan mengarah pada peningkatan kemampuan berkomunikasi dan berjejaring dengan muatan relevansi, keautentikan, *higher order thinking skills*, dan kolaborasi yang di dalamnya terdapat beberapa akomodasi bagi siswa yang beragam. Akomodasi nampak

pada bantuan khusus bagi siswa disabilitas dalam aktivitas belajar, penilaian, dan interaksi. Bantuan dapat berupa virtual (penguatan positif, motivasi, lingkungan yang ramah) dan fisik (aksesibilitas media, bangunan, dan alat bantu dalam beraktivitas).

Saat memberikan instruksi, guru juga dapat memilah siswa disabilitas menjadi dua kategori, yaitu siswa dengan hambatan kognitif dan siswa tanpa hambatan kognitif. Bagi siswa disabilitas dengan hambatan kognitif, kegiatan dilakukan dengan memodifikasi atau bahkan menghilangkan beberapa bagian. Ketika akan menghilangkan suatu bagian, guru harus ekstra hati-hati agar tidak merenggut hak siswa dalam belajar. Bagi siswa tanpa hambatan kognitif, guru dapat merancang pembelajaran yang sama dengan siswa reguler lainnya. Mengetahui hambatan (kebutuhan) ini dapat berfungsi sebagai pijakan awal dalam menentukan program dan menentukan indikator keberhasilan dalam pembelajaran. Akan tetapi, perlu diingat, pembagian ini bersifat internal (hanya diketahui oleh guru maupun pihak sekolah lain) dan tidak dapat digunakan untuk melabeli anak. Secara tidak sadar, label sering kali tidak menguntungkan bagi siswa disabilitas, misalnya saja pengelompokan siswa disabilitas dalam pembelajaran oleh guru sehingga terpisah dari kelas utama.

Untuk mengatasi ketidakmampuan siswa disabilitas dalam mengembangkan kemampuan literasi 5.0, perlu adanya langkah strategis terintegrasi yang menyentuh dimensi individual, kultural, dan struktural yang berdasarkan pada Society 5.0. Pada aspek individual, guru berkewajiban mengenali kondisi autentik anak, mulai dari karakteristik akademik, derajat kedisabilitas, kemampuan komunikasi, sampai pada faktor pendukung-penghambat keberhasilan anak. Kondisi real anak akan membantu guru mendesain rencana pembelajaran individual (RPI) yang mengacu pada kurikulum reguler untuk siswa tanpa hambatan kognitif dan kurikulum yang disesuaikan untuk siswa dengan akademik di bawah rata-rata dengan tetap mempertimbangkan integrasi teknologi dan masyarakat dalam lingkup yang sederhana. Dalam konteks kultural, guru perlu mendorong siswa disabilitas untuk dapat mengaktualisasikan prestasi,

misalnya dengan cara berpartisipasi aktif dalam forum sekolah, unjuk bakat, dan pameran karya dengan mengedepankan kemampuan literasi berbasis teknologi. Unjuk bakat dan prestasi ini akan mengikis stigma negatif siswa disabilitas yang selama ini disandangnya.

Dalam dimensi struktural, guru dan sekolah harus memiliki kebijakan yang mendukung pendidikan berkeadilan bagi siswa disabilitas. Konsekuensinya, program-program yang bersifat pemberdayaan berbasis teknologi menjadi menarik untuk dikembangkan, seperti pelatihan penanganan siswa disabilitas, pengadaan teknologi asistif, maupun pembangunan sarana sekolah yang aksesibel bagi siswa disabilitas. Pihak sekolah juga harus melakukan adaptasi gerakan literasi baru yang diintegrasikan dengan melakukan penyesuaian kurikulum dan sistem pembelajaran misalnya dengan *project-based learning* dan *problem-based learning* yang dilakukan dengan pendekatan tematik dan *blended learning* (Sudibjo et al., 2019). Penilaian yang digunakan menganut prinsip berkelanjutan dan menyeluruh guna memandirikan siswa disabilitas untuk belajar dan bekerja sama. Penilaian menjadi lebih nyata karena dilihat dari karya portofolio dari sebuah proyek tertentu yang kontekstual dan holistik secara sosial, personal, dan dari aspek kompetensi literasi.

Upaya berkelanjutan dalam melakukan mengembangkan pembelajaran yang berkualitas bertumpu pada keyakinan bahwa siswa disabilitas berhak mendapatkan pendidikan berkeadilan yang berkualitas dengan berbagai model, metode, dan strategi pembelajaran. Berbagai upaya yang dilakukan ini bertujuan untuk memenuhi hak siswa disabilitas dalam mendapatkan pembelajaran yang relevan, tepat, inklusif, dan setara. Berkaitan dengan pendidikan berkeadilan pada era 5.0, guru perlu memiliki kemampuan teknologi, pemahaman yang mendalam tentang keberagaman, kreativitas, berpikir kritis, dan kemampuan komunikasi yang tinggi sebagai modal dasar merancang pendidikan berkeadilan bagi semua siswa. Dalam konteks sekolah ramah disabilitas, peran guru sangat penting dalam menciptakan lingkungan inklusif. Peran guru yang kompeten dan berkomitmen menjadi kunci untuk menciptakan pendidikan yang adil dan inklusif.

## E. Penutup

Keragaman dan rekonstruksi sosial di sekolah inklusi memiliki hubungan yang erat. Sekolah dapat berperan sebagai wahana mengurai permasalahan yang berkaitan dengan keragaman dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan di sekolah. Sekolah inklusi bertujuan untuk menyediakan pendidikan yang dapat diakses oleh semua siswa, termasuk mereka dengan disabilitas. Ketika konsep rekonstruksi sosial diterapkan dalam konteks sekolah inklusi, hal ini mengacu pada usaha untuk mengubah pandangan dan perilaku masyarakat sekolah serta membangun kembali struktur dan norma yang mendukung integrasi dan partisipasi siswa dengan kebutuhan khusus.

Dalam menciptakan pendidikan yang adil, guru dapat melakukan akomodasi kurikulum. Akomodasi dalam kurikulum bisa dilakukan dengan modifikasi dan adaptasi pembelajaran. Modifikasi kurikulum dilakukan oleh guru untuk memastikan siswa bisa mengikuti pembelajaran, seperti mengubah bahan pelajaran, media yang digunakan, cara mengevaluasi, strategi pengajaran, dan metode pembelajaran. Meskipun modifikasi ini bisa memengaruhi materi atau cara pengajaran, tujuan dan standar pembelajaran tetap sama dari kegiatan yang dilakukan. Sementara itu, adaptasi kurikulum mengacu pada penyesuaian target pembelajaran sesuai dengan kondisi anak. Modifikasi dan adaptasi dilakukan secara bersamaan dan terus-menerus agar anak terlibat dalam pembelajaran, yang merupakan bagian penting dalam sekolah inklusi.

Peran guru dalam menyajikan akomodasi dan merancang kurikulum yang ramah bagi siswa disabilitas memiliki dampak signifikan. Mereka bertindak sebagai arsitek pembelajaran yang menyesuaikan metode pengajaran, menciptakan lingkungan inklusif, dan memastikan akses pendidikan yang tanpa hambatan bagi semua siswa. Melalui upaya ini, guru memegang peran krusial dalam menciptakan lingkungan belajar yang mendukung, memungkinkan setiap siswa meraih potensinya secara optimal. Kurikulum yang dirancang dalam pendidikan berkeadilan diciptakan secara fleksibel dengan tetap mengacu pada kurikulum nasional. Kurikulum ini

menjadi ramah bagi semua anak dikarenakan dalam praktiknya guru akan melakukan akomodasi kurikulum dalam aspek tujuan, materi, proses, waktu, sumber belajar, dan evaluasi. Penyesuaian ini dilakukan berdasarkan kondisi siswa sehingga diharapkan siswa akan mampu berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Partisipasi aktif siswa akan membawa lonjakan besar pada prestasi siswa disabilitas sehingga stigma negatif yang melekat akan berkurang. Siswa disabilitas yang semula dianggap beban di kelas, siswa titipan, dan tidak mampu mengeluarkan potensi terbaiknya akan bertransformasi menjadi siswa yang setara dengan anak reguler lainnya.

Dalam konteks pendidikan berkeadilan, guru memainkan peran penting sebagai pihak yang mempersatukan pemahaman inklusif dalam kegiatan yang dirancang di sekolah. Guru menjadi fasilitator untuk membentuk pemahaman, penghargaan, dan penerimaan terhadap keberagaman di antara siswa. Dukungan yang guru hadirkan akan memperkuat pandangan positif terhadap perbedaan sehingga menjadikan guru katalisator utama dalam proses rekonstruksi sosial yang inklusif di ruang kelas. Berkaitan dengan isu disabilitas, perubahan yang diharapkan ialah peserta didik memiliki perspektif terbuka pada kondisi disabilitas seseorang sehingga ia akan melihat kedisabilitas sebagai sebuah keragaman. Siswa disabilitas pun akan diajak untuk lebih peka pada kondisi yang ia jalani, lebih maju, lebih berkembang, mampu menyuarakan haknya, dan menjadi pribadi yang otonom. Pendidikan berkeadilan dalam konteks rekonstruksi sosial akan mengikis pandangan siswa disabilitas sebagai kaum marginal yang tidak mampu menyuarakan dirinya sendiri. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang ramah bagi semua, saling menghargai, dan adil bagi semua siswa.

Kompetensi guru menjadi kunci dalam mengubah pembelajaran yang semula kaku, tertutup, dan tidak fleksibel menjadi pembelajaran yang terbuka, menyenangkan, dan menghormati hak asasi setiap pelajar. Guru menjadi ujung tombak dalam menumbuhkan nilai-nilai inklusivitas, melakukan pendampingan belajar bagi semua anak, dan memberikan teladan. Guru juga diharuskan memiliki komitmen

dalam melayani anak dengan segala kebutuhan, melihat akomodasi pembelajaran sebagai sebuah kekuatan kelas, dan melihat keberagaman sebagai sebuah kondisi wajar. Dalam merespons keberagaman, guru dapat melakukan internalisasi nilai-nilai positif yang dilakukan melalui model, metode, maupun strategi pembelajaran yang mengedepankan kebersamaan, saling menghargai, dan antidiskriminasi.

Dalam mewujudkan pendidikan berkeadilan di era 5.0 bagi siswa disabilitas di sekolah inklusi, peran guru sangat sentral. Mereka menjadi agen perubahan yang membawa nilai-nilai keadilan ke dalam pendidikan, menjamin kesetaraan akses dan peluang bagi setiap individu. Dengan pendekatan pengajaran inklusif dan lingkungan belajar yang merangkul keberagaman, guru membangun fondasi yang kuat bagi masyarakat belajar yang menghargai perbedaan dan mendukung pertumbuhan serta perkembangan siswa secara holistik. Di era 5.0, guru dapat memanfaatkan teknologi yang bertujuan membantu siswa mengakses pembelajaran dan memproses informasi secara lebih baik. Pemanfaatan teknologi ini dapat digunakan sebagai alat bantu yang memudahkan siswa disabilitas memahami informasi sehingga ia mampu terlibat dan berpartisipasi.

Di era 5.0 guru harus mampu menguasai teknologi untuk memfasilitasi berbagai kebutuhan siswa dan berkomunikasi secara aktif dengan orang tua dan teman sejawat. Guru harus memiliki pemahaman mendalam tentang keberagaman, baik dari segi budaya, bahasa, agama, maupun kemampuan siswa. Selain itu, guru juga harus memiliki kreativitas tinggi, berpikir kritis, dan komunikatif untuk menciptakan pembelajaran yang adil. Dalam konteks sekolah ramah disabilitas, guru harus mampu memberikan teladan penghargaan pada keberagaman yang ada di kelas, dengan tetap menjaga muruah pendidik.

Sebagai contoh, siswa disabilitas netra bisa menggunakan *screen reader* sehingga dapat membantu membaca teks pada layar, pemindai dokumen yang dapat mengubah dokumen tertulis menjadi bentuk yang dapat diakses oleh disabilitas netra, penggunaan *keyboard* Braille, maupun kamera pembaca teks. Contoh lainnya, misal disabilitas rungu

dapat menggunakan aplikasi *voice to text* sehingga dapat menangkap informasi verbal secara lebih jelas. Pemanfaatan teknologi ini akan menciptakan pembelajaran yang efektif dan mampu meningkatkan pemahaman siswa pada materi yang sedang diajarkan. Hal yang perlu digarisbawahi ialah bahwa teknologi yang digunakan berfungsi sebagai alat bantu untuk membuka akses. Interaksi antara guru dan siswa serta siswa dan siswa tetap mutlak dilakukan karena merupakan roh dari pembelajaran.

Kompetensi guru dalam penguasaan teknologi untuk memfasilitasi berbagai kebutuhan siswa menjadi faktor kunci dalam mewujudkan pendidikan berkeadilan. Selain itu, guru harus memiliki kompetensi mumpuni berpikir kritis, kreatif, dan komunikasi untuk menciptakan pembelajaran aksesibel untuk semua. Dalam konteks sekolah, guru berkewajiban mendukung sekolah sebagai wahana internalisasi keberagaman dan perubahan sosial yang efektif demi menciptakan lingkungan ramah disabilitas. Gagasan untuk menciptakan sekolah ramah dengan akomodasi kurikulum diharapkan mampu meningkatkan kualitas siswa disabilitas yang dimulai dari sekolah guna mewujudkan pendidikan berkeadilan berbasis teknologi di era 5.0. Berdasarkan inisiatif ini, siswa disabilitas tidak lagi dipandang sebagai simbol diskriminasi, tetapi sebagai individu yang mampu bersaing dan sejajar dengan nondisabilitas.

## Referensi

- Ainscow, M. (2020). Promoting inclusion and equity in education: Lessons from international experiences. *Nordic Journal of Studies in Education Policy*, 6(1), 7–16. <https://doi.org/10.1080/20020317.2020.1729587>
- Baglieri, S. (2017). *Disability studies and the inclusive classroom: Critical practices for embracing diversity in education* (2nd edition). Routledge.
- Ball, S., & Collet-Sabé, J. (2022). Against school: An epistemological critique. *Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education*, 43(6), 985–999. <https://doi.org/10.1080/01596306.2021.1947780>
- Benson, L., Harkavy, I., Puckett, J., Hartley, M., Hodges, R. A., Johnston, F. E., & Weeks, J. (2017). *Knowledge for social change: Bacon, Dewey, and the revolutionary transformation of research universities in the twenty-first century*. Temple University Press.
- Berkowitz, R. (2022). School matters: The contribution of positive school climate to equal educational opportunities among ethnocultural minority students. *Youth & Society*, 54(3), 372–396. <https://doi.org/10.1177/0044118X20970235>
- Campbell, F. (2019). Precision ableism: A studies in ableism approach to developing histories of disability and abledment. *Rethinking History: The Journal of Theory and Practice*, 23(2), 138–156. <https://doi.org/10.1080/13642529.2019.1607475>
- García-Carrión, R., Villarejo-Carballido, B., & Villardón-Gallego, L. (2019). Children and adolescents mental health: A systematic review of interaction-based interventions in schools and communities. *Frontiers in Psychology*, 10, Artikel 918. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.00918>
- Chung, S. K., & Li, D. (2020). Social reconstructionist art education: Exploring issues of homelessness with elementary students. *The International Journal of Arts Education*, 18(1), 68–90.
- Collins, A., & Halverson, R. (2018). *Rethinking education in the age of technology: The digital revolution and schooling in America*. Teachers College Press.
- Counts, G. (1959). *Dare the schools build a new social order*. Southern Illinois University Press.

- Counts, G. (1946). *Education and the promise of America*. Macmillan Company.
- Dewey, J. (2012). *Democracy and education: An introduction to the philosophy of education*. Duke Classics.
- Dewey, J. (2021). *America's public philosopher: Essays on social justice, economics, education, and the future of democracy*. Colombia State University.
- Diyanti, B. Y., & Zuhdi, D. (2020). Teaching english to young learners practicum program: Do philosophical foundations matter? *Journal of English Education and Teaching*, 4(3), 294–309. <https://doi.org/10.33369/jeeet.4.3.294-309>
- Dwyer, P. (2022). Stigma, incommensurability, or both? Pathology-first, person-first, and identity-first language and the challenges of discourse in divided autism communities. *Journal of Developmental & Behavioral Pediatrics*, 43(2), 111–113. DOI: 10.1097/DBP.0000000000001054
- Falaq, Y. (2020). Education of citizenship in higher education as a fortress of national character in facing the era of society 5.0. *Journal of Educational Sciences*, 4(4), 802–812. <https://doi.org/10.31258/jes.4.4.p.802-812>
- Fovet, F. (2019). *Not just about disability: Getting traction for UDL implementation with international students*. Routledge.
- Friedman, R., & George, A. (Ed.). (2022). *Online language teaching in diverse contexts*. Cambridge Scholars Publishing.
- Hermaswari, M., Lasmawan, I., & Sriartha, I. P. (2021). Model pembelajaran rekonstruksi sosial berbasis multikultural. *Jurnal Pendidikan IPS Indonesia*, 5(1). <https://doi.org/10.23887/pips.v5i1.271>
- Heywood, J. (2018). Social reconstruction. Dalam *Empowering professional teaching in engineering* (203–208). [https://doi.org/10.1007/978-3-031-79382-0\\_16](https://doi.org/10.1007/978-3-031-79382-0_16)
- Horn, E., & Banerjee, R. (2009). Understanding curriculum modifications and embedded learning opportunities in the context of supporting all children's success. *Language, Speech, and Hearing Services in Schools*, 40(4), 406–415. [https://doi.org/10.1044/0161-1461\(2009/08-0026\)](https://doi.org/10.1044/0161-1461(2009/08-0026))
- Kern, L., Delaney, B., Clarke, S., Dunlap, G., & Childs, K. (2001). Improving the classroom behavior of students with emotional and behavioral disorders using individualized curricular modifications. *Journal of Emotional and Behavioral Disorders*, 9(4), 239–247. <https://doi.org/10.1177/106342660100900404>

- Khadka, S. (2019). *Bridging the multimodal gap: From theory to practice*. Utah State University Press.
- Lee, S.-H., Wehmeyer, M. L., Soukup, J. H., & Palmer, S. B. (2010). Impact of curriculum modifications on access to the general education curriculum for students with disabilities. *Exceptional Children*, 76(2), 213–233. <https://doi.org/10.1177/001440291007600205>
- Majoko, T. (2019). Teacher key competencies for inclusive education: Pragmatic realities of Zimbabwean special needs education teachers. *Sage Open*, 9(1), <https://doi.org/10.1177/2158244018823455>
- Martin, R. J. (1994). Multicultural social reconstructionist education: Design for diversity in teacher education. *Teacher Education Quarterly*, 21(3), 77–89. <http://www.jstor.org/stable/23475809>
- Mayes, K. A. (2022). *The unteachables: Disability rights and the invention of Black special education*. University of Minnesota Press.
- McKernan, J. A. (2013). The origins of critical theory in education: Fabian socialism as social reconstructionism in nineteenth-century Britain. *British Journal of Educational Studies*, 61(4), 417–433. <https://doi.org/10.1080/00071005.2013.824947>
- Meyer, A., Rose, D. H., & Gordon, D. (2013). *Universal design for learning: Theory and practice 1st Edition*. CAST Professional Publishing.
- Mutisya, J. K., Itolondo, W. A., & Ikinya, S. K. (2021). Role of tutors' social reconstruction orientation on choice of instructional approaches in public primary teachers' training colleges in Kenya. *East African Journal of Interdisciplinary Studies*, 3(1), 12–26. <https://doi.org/10.37284/eajis.3.1.268>
- Reed, R. F., & Johnson, R. W. (Ed.). (2000). *Philosophical documents in education* (Second edition). Longman.
- Salgues, B. (2018). *Society 5.0: Industry of the future, technologies, methods and tools*. Wiley-ISTE.
- Sandall, S., Schwartz, I. S., Joseph, G. E., & Gauvreau, A. N. (2019). *Building blocks for teaching preschoolers with special needs* (Third edition). Paul H. Brookes Publishing.
- Scior, K., Hamid, A., Hastings, R., Werner, S., Belton, C., Laniyan, A., Patel, M., & Kett, M. (2020). Intellectual disability stigma and initiatives to challenge it and promote inclusion around the globe. *Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities*, 17(2), 165–175. <https://doi.org/10.1111/jppi.12330>

- Shrivastava, S. K. (2017). Promotion of moral values through education. *International Journal of Research in Social Sciences*, 7(6), 103–108.
- Silván-Ferrero, P., Recio, P., Molero, F., & Nouvilas-Pallejà, E. (2020). Psychological quality of life in people with physical disability: The effect of internalized stigma, collective action and resilience. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(5), Artikel 1802. <https://doi.org/10.3390/ijerph17051802>
- Slee, R., & Tait, G. (2022). *Ethics and inclusive education: Disability, schooling and justice*. Springer.
- Stanley, W. B. (1981). Toward a reconstruction of social education. *Theory & Research in Social Education*, 9(1), 67–89. <https://doi.org/10.1080/00933104.1981.10506103>
- Sudibjo, N., Idawati, L., & Harsanti, HG. R. (2019). Characteristics of learning in the era of Industry 4.0 and Society 5.0. Dalam *Proceedings of the international conference on education technology (ICoET 2019)* ( 276–278). Atlantis Press.
- Suhartini, S., Sekarningrum, B., Sulaeman, M., & Gunawan, W. (2023). Social construction of student behavior through character education based on local wisdom. *Journal of Social Studies Education Research*, 10(3), 276–291. <https://www.learntechlib.org/p/216467/>
- Suharto, Kuipers, P., & Dorsett, P. (2016). Disability terminology and the emergence of ‘diffability’ in Indonesia. *Disability & Society*, 31(5), 693–712. <https://doi.org/10.1080/09687599.2016.1200014>
- Tavares, M. C., Azevedo, G., & Marques, R. P. (2022). The challenges and opportunities of era 5.0 for a more humanistic and sustainable society—A literature review. *Societies*, 12(6), Artikel 149. doi:10.3390/soc12060149
- Uwak, S. O. (2018). Curriculum definition: A misleading philosophy. *International Journal of Advancement in Development Studies*, 13(2), 27–34.
- Weathers, E. S., & Sosina, V. E. (2022). Separate remains unequal: Contemporary segregation and racial disparities in school district revenue. *American Educational Research Journal*, 59(5), 905–938. <https://doi.org/10.3102/00028312221079297>